



Memihak Kebenaran

Pemimpin Umum:  
Sinyo H Sarundajang

Wakil Pemimpin Umum:  
Randolph Latumahina

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:  
Primus Dorimulu

Editor at Large:  
John Riady

## Tajuk Rencana

### Kaderisasi Partai Lemah

Maraknya kepala daerah yang tertangkap dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan masih ada masalah dalam proses perekrutan pemimpin oleh partai politik (parpol). Pola perekrutan pemimpin yang dilakukan partai masih berbiaya besar, sehingga calon yang diusung harus mengembalikan modal yang dikeluarkan dengan cara mengorupsi uang negara atau menyewakan kewenangan ketika terpilih.

Praktik korupsi kepala daerah seharusnya tidak terjadi atau paling tidak bisa dikurangi bila partai benar-benar menerapkan sistem merit dalam proses perekrutan calon pemimpin. Partai memilih kader terbaik untuk menjadi calon kepala daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Perekrutan pemimpin dengan melihat rekam jejak dan integritasnya, bukan sekadar kemampuan finansial atau hanya karena "berdarah biru" di partai.

Keseriusan partai dalam merekrut calon pemimpin belakangan ini dipertanyakan. Pasalnya adalah operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah. Bahkan, ada kepala daerah itu yang kembali akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Sepanjang tahun ini atau periode Januari sampai pertengahan Februari, setidaknya ada tujuh kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Mereka adalah Gubernur Jambi: Zumi Zola, Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Bupati Kebumen Muhammad Syafrudin, Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, Bupati Jombang Nyono Suharli, Bupati Ngada Marianus Sae, dan Bupati Subang Imas Aryumingsih.

Tujuh kepala daerah itu menamban panjang daftar kepala daerah yang menjadi tahanan KPK. Sepanjang tahun lalu, sedikitnya ada sembilan kepala daerah yang ditetapkan tersangka, baik yang terjaring OTT maupun pengembangan penyelidikan dari kasus-kasus yang tengah ditangani KPK.

Sembilan kepala daerah itu adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnain, Wali Kota Cilegon Tubagus Imen Ariyadi, Wali Kota Tegay Siti Mashita, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widayarsi, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, Bupati Pamekasan Ahmad Syaifi, Bupati Ngarjuna Taufiqurrahman, dan Wali Kota Mojokerto Masud Yunus.

Selain mengorupsi uang negara untuk kepentingan pribadi, para kepala daerah tersebut juga terjerat kasus suap yang diberikan oleh para penggarap proyek di wilayah administratif masing-masing. Suap diberikan agar para kepala daerah itu memberikan proyek-proyek pembangunan atau perizinan di daerah mereka.

Korupsi dan suap yang dilakukan para kepala daerah itu terjadi tidak hanya karena mereka ingin memperkaya diri. Mereka juga harus mengembalikan uang yang telah dikeluarkan saat menjadi peserta pilkada, mulai pencalonan hingga saat kampanye. Puluh-ratusan miliar rupiah yang dikeluarkan itu harus dikembalikan, terutama kepada para pemodal saat kampanye.

Perilaku koruptif para kepala daerah itu terjadi karena biaya politik yang mahal. Di sini, peran partai tidak bisa diabaikan. Meski kerap ditutup-tutupi partai, praktik mahar politik masih terjadi. Agar bisa diusung partai sebagai calon kepala daerah, kandidat harus menyerot sejumlah uang.

Partai beralih bahwa uang itu akan digunakan untuk biaya kampanye dengan menggerakkan kader di daerah hingga merekrut saksi-saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Namun, faktanya, biaya-biaya itu masih ditanggung oleh kandidat.

Kita tentu berharap agar praktik korupsi kepala daerah itu tidak lagi terjadi. Perilaku koruptif pemimpin itu kontraproduktif dengan tujuan mereka menjadi pemimpin, yang digambarkan sebagai pembela rakyat, yakni menyejahterakan rakyat.

Selain penindakan oleh aparat penegak hukum yang masif, khususnya oleh KPK, peran partai tidak bisa diabaikan. Partai harus mulai berbenah diri dalam proses perekrutan calon pemimpin. Partai harus menjadikan kapabilitas, rekam jejak, dan integritas menjadi faktor utama dalam memilih pemimpin.

Di sini, proses kaderisasi partai sangat penting. Dalam hal ini kita mengapresiasi langkah sejumlah partai politik yang membuat sekolah partai. Para calon kepala daerah atau calon anggota legislatif yang diusung partai harus berada di dalam kelas untuk mendapatkan pembekalan agar menjadi pemimpin yang baik.

Kita ingin agar pola sekolah partai itu dijadikan dasar dalam proses kaderisasi di tubuh partai. Artinya, pola seperti itu tidak hanya dilakukan saat menjelang pemilihan umum atau pilkada, yang waktunya hanya singkat, sekitar dua atau tiga hari. Proses kaderisasi berupa penanaman nilai-nilai kebangsaan, antikorupsi, serta visi dan misi partai harus dilakukan secara terus menerus.

Pemberian nilai-nilai itu harus diberikan kepada para kader partai dalam suatu proses pendidikan jangka panjang. Proses jangka panjang itu untuk mengoptimalkan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tersebut, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh, peduli terhadap kepentingan rakyat, dan berintegritas.

Proses seperti ini juga menguntungkan bagi partai, karena tidak akan kekurangan stok pemimpin yang berintegritas. Dengan demikian, saat daerah membutuhkan pemimpin yang bisa menyejahterakan rakyat, partai tidak kelimpungan untuk mencari calon. Partai tinggal menunjuk salah satu kader yang telah dididik sebagai pemimpin yang baik, tanpa uang mahar.



## Fenomena Banjir Jakarta

Dua pekan lalu Jakarta dilanda banjir bandang. Hujan deras di kawasan Puncak dan Bogor telah mengakibatkan longsor sekaligus membuat ketinggian air Sungai Ciliwung di ambang batas bahaya. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat terdapat 22 titik longsor di Kabupaten Bogor, seperti Kampung Cisuren, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua.

Banjir pun diprediksi selalu mengancam DKI Jakarta di kala hujan "menyapa" daerah penyangga sebagai konsekuensi. Dua belas wilayah Ibu Kota yang terdampak telah dirilis dengan terang, yakni Srengseng Sawah, Rawajati, Kalibata, Pengadegan, Pejaten Timur, Kebon Baru, Bukit Duri, Balekambang, Cililitan, Cawang, Bidara Cina, dan Kampung Melayu. Sebuah realitas yang niscaya menggugah publik Jakarta untuk berbenah.

Banjir di Ibu Kota yang men-tradisi di setiap musim penghujan adalah fakta yang menghina martabat bangsa. Ekosistem Jakarta sejatinya amatlah nyaman. Kota ini memiliki 13 sungai yang "didekap" dua sungai besar, di timur ada Citarum, di barat ada Cisadane. Kali Ciliwung pun hadir mengalir Ibu Kota meski luapannya sering "dikriminalisasi" sebagai penyebab banjir.

Jakarta, di era kolonial ratusan tahun lampau, dikenal sebagai Venesia dari Timur. Kota yang dikelilingi sungai-sungai seperti Venesia di Italia, berkat kelok indah belasan sungainya yang



SUPARTO WIOYO

bermuara ke pantai utara (pantura). Oleh karenanya, Pantura, secara ekologis-plano-logis adalah basis konservasi yang jauh dari imaji properti, apalagi direklamasi.

Pengurukan Pantura terpotret memarakporandakan harmoni sosial-ekonomi dan ekologi pesisirnya. Hal ini berkonsekuensi pada hilangnya biota air maupun daya dukung teluk sebagai penampung air. Pegiat lingkungan Jakarta telah bereaksi sambil menerka, dengan reklamasi, Jakarta semakin tergenang dan tenggelam. Penduduk Jakarta sangat mafhum atas konstelasi kewilayahannya yang rentan tenggelam, apalagi dengan agenda pulau buatan.

**Inilah pembangunan kota yang futuristis dengan mengintegrasikan secara harmonis antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan yang menegasikan trisula ekonomi-sosial-ekologi diyakini akan mendegradasi metropoliten menuju nekropoliten, yaitu kota kematian bagi warganya.**

Dampak kritisnya lahan di Bogor bagi Jakarta pun mudah dibaca, tetapi negara seperti tidak hendak beranjak mengatasinya. Luas hutan di Puncak yang hanya tersisa 13% adalah manifestasi rendahnya komitmen ekologis pemegang otoritas. Sejak tiga dasawarsa yang lalu, terpotret adanya penyalangunaan ruang di kawasan Puncak dan Jawa Barat. Banjir dan longsor yang kini menimpa merupakan panem atas kebijakan yang abai terhadap kepentingan lingkungan. Tatra ruang setempat digilas oleh tata uang Jabodetabek Plus, dan Jakarta menaui semua derita ekologi itu.

Tata uang di megapoliten telah mengembuskan pekabaran tentang Ibu Kota yang tengah bunuh diri secara ekologi (*ecological suicide*). Memang kota-kota di Indonesia kerap menyuguhkan pentas penjurungkirbalikan tata ruang yang tidak sesuai dengan landasan topografis-klimatologis.

#### Pendekatan Klimatopolis

Iklim pada hakikatnya adalah literatur alam yang penting dalam merencanakan pembangunan. Manusia tak elok melawan cuaca, tetapi wajib mengelolanya secara keilmuan. Terhadap hal ini, Matthew W Kahn (2010) telah mempublikasikan konsepnya dalam membangun kota yang bersandarkan pada pemaknaan iklim, Klimatopolis.

Berbagai pustaka menunjukkan bahwa mengkonstruksi wilayah sesuai dengan kondisi iklim merupakan opsi utama yang searah dengan pembangunan polis (negara kota) sejak di era Yunani.

Bersambung ke halaman 17

Fenomena...

sambungan dari halaman 16

Pembangunan negara kota ini pada mulanya lahir sebagai wadah ajaran demokrasi, yang kini dikembangkan menjadi tipe ideal tata kelola urban yang partisipatoris dengan pendekatan ekologis. Model penataan ini dikualifikasi memasuki rumpun pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable city*).

Inilah pembangunan kota yang futuristik dengan mengintegrasikan secara harmonis antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan yang menegasikan trisula ekonomi-sosial-ekologi diyakini akan mendegradasi metropolitan menuju nekopilitan, yaitu kota kematian bagi warganya.

Dengan berbasis pendekatan klimatopolis, tidak ada lagi ungkapan bahwa banjir dan longsor itu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Ingatlah, hujan itu rahmat, bukan laknat. Mengapa berkah air hujan berubah menjadi bencana yang menewaskan warga negara? Pasti ada yang salah dalam mengelola wilayah.

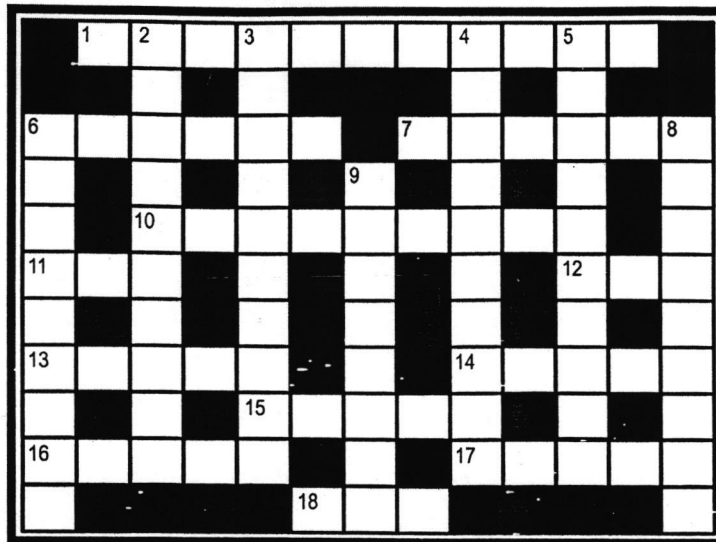
Pemimpin DKI Jakarta, Banten dan Jabar wajib bersinergi membangun daerahnya dalam matra nasional bersendikan iklim daerah. Jangan sampai kalau di musim penghujan sibuk membenahi jalan, membuat sumur resapan, membersihkan gorong-gorong, sementara di musim kemarau ramai-ramai tanam pohon, dan rakor dari kantor ke kantor. Ini namanya pembangunan *salah musim* (salah musim), gagap klimatologis.

Khalayak telah memahami bahwa banjir yang melanda Jakarta melakoni kembali cerita lama kepulauan sebuah kota dengan ungkapan vulgar nan sinis, sebagaimana ditulis Kuns-ter: *tragic sprawl scope of cartoon architecture, junked cities and ravaged country side*.

Penataan Jakarta membutuhkan penguatan wawasan lingkungan dari para penganan wewenang pemerintahan. Mewujudkan Jakarta sebagai Ibu Kota dengan gedung-gedung jangkung yang angkuh tanpa ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai, sangatlah naif. Bangunan yang menjulang sudah sering terbukti mengalami kelumpuhan melawan banjir bandang. Jakarta dan wilayah penyangga Ibu Kota tak boleh jeda berbenah menjaga supremasi ekologisnya.

PENULIS ADALAH KOORDINATOR MAGISTER SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN SOKOAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

SUARA SALING SILANG



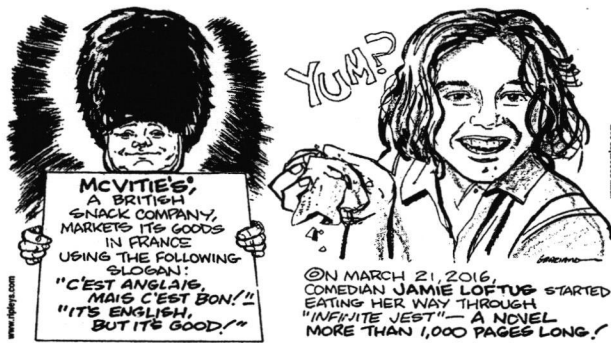
**PERTANYAAN SSSP No. 9015 : MENDATAR :**  
 1. Sebutan untuk tim sepak bola ; 6. Letak, kedudukan ; 7. Orang yang ditugasi atau disuruh ; 10. Golongan orang yang secara hukum memiliki hak memilih ; 11. Parlemen (disingkat) ; 12. Menikmati hidangan (Inggris) ; 13. Bintang berekor ; 14. Gelar kesarjanaan ; 15. Uang suap yang diberikan kepada pejabat ; 16. Hilang akal ; 17. Induk organisasi olahraga karate ; 18. Hidup.

**MENURUN :**  
 2. Percobaan yang ber sistem dan berencana ; 3. Perusahaan angkutan barang ; 4. Pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan ; 5. Metode dan gaya rancangan suatu bangunan ; 6. Penunjang, orang yang membantu atau menyokong ; 8. Kenangan manis pada masa yang telah lama silam ; 9. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

**JAWABAN SSSP No. 9014 : MENDATAR :**  
 1. Payung ; 4. Karate ; 8. Serang ; 9. Mantap ; 11. Rinci ; 12. Ronda ; 13. Sport ; 14. Gram ; 16. Sauh ; 17. Amerika ; 18. Menu ; 19. Dian ; 20. Tomado.

**MENURUN :**  
 1. Pusparagam ; 2. Yordania ; 3. Ningrat ; 5. Analisa ; 6. Astakona ; 7. Empat tahun ; 10. Angsuran ; 15. Maut ; 16. Sado.

Ripley's Believe It or Not!



Mc Vitie, produsen makanan ringan asal Inggris, memasarkan produknya di Prancis dengan mengunakan slogan: "C'est Anglais, mais c'est bon!" yang artinya: "Ini (buatan) Inggris, tapi ini enak!"

Pada Juli 2017, 80 orang membentuk rantai manusia di Pantai Panama City di Florida, untuk menyelamatkan perenang yang terperangkap arus deras!

Pada 21 Maret 2016, komedian Jamie Loftus mulai memakan "Infinite Jest", sebuah novel setebal lebih dari 1.000 halaman!



Harian Umum Sore SUARA PEMBARUAN

Mulai terbit 4 Februari 1987 sebagai kelanjutan dari harian umum sore SINAR HARAPAN yang terbit pertama 27 April 1961.

SP suarapembaruan.com

BERITA SATU Impacting Lives Through News You Can Trust

Penerbit: PT Media Interaksi Utama  
 SK Menpen RI Nomor 224/SK/MENPEN/SUPPIA/7/1987  
 Presiden Direktur: Theo L. Sambuaga, Direktur: Randolph Latunahina, Drs Lukman Djaja MBA  
 Alamat Redaksi: Berita Satu Plaza, lantai 11  
 Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950, Telepon (021) 2995 7500, Fax (021) 5277 981  
 BERITA SATU MEDIA HOLDINGS: President Director & CEO: Sinyo H Sarundajang, Deputy CEO: Johannes Tong, Editor at Large: John Riadi,  
 Finance Director: Lukman Djaja

Dewan Redaksi: Theo L. Sambuaga (Ketua), Markus Parmadi, Sinyo H Sarundajang, Baktiendra Prawiro MSc, Ir Jonathan L Paragak MSc, Didik J Rachbini, Samuel Tahir Penasihat Senior: Irwan Djaja, Samuel Tahir Redaktur Pelaksana: Aditya L Djono, Dwi Argo Santosa, Asisten Redaktur Pelaksana: Anselmus Bata, Asni Ovier Dengan Polin, Redaktur: Alexander Madji, Bernardus Wijayaka, Irawati Diah Astuti, Syalrul Mardhy Posaibitu, Surya Lesmana, Yuliantino Situmorang, Unggul Wirawan, Asisten Redaktur: Agustinus Lestyk, Elvira Anna Siahan, Siprianus Edi Hardum, Heri S Soba, Jers Montesori, Jeany A Aipassa, Willy Masaharu Staf Redaksi: Ari Supriyanti Rikin, Carlos KY Paath, Dina Marafe, Deti Mega Purnamasari, Erwin C Sihombing, Fana FS Putra, Gardi Gazarin, Hendro D Situmorang, Hotman Siregar, Joanto De Saajojo, Lona Olavia, Natasia Christy Wahyuni, Novianti Setuningsih, Robertus Wardi, Ruht Semiono, Yeremia Sukoyo, Adi Marsiela (Bandung), Fуска Sani Ewani (Yogyakarta), I Nyoman Mardika (Denpasar), Ignatius Herjambang (Bogor), Laurensius Dami (Serang), Arnold H Sianturi (Medan), John Dafril Lory (Palu), Mikael Niman (Bekasi), Margaretha Feybe Lumanauw (Manado), Radesman Saragih (Jambi), Robert Isidorus Vanwi (Papua), Stefy Thenu (Semarang), Sahat Oloan Saragih (Pontianak), Usmin (Bengkulu), Yoseph Andu Kelen (Kupang), Kepala Sekretariat Redaksi: Rully Satriadi, Koordinator Tata Letak: Rommy Lukumahwa, Koordinator Grafis: Antonius Budi Nurcahyo.

Advertising: Deputy Director: Sri Rejeki Listiyorini, General Manager: Djemmy Piether, Senior Manager: Benediktus Utoro,  
 Marcomm & Event Management: General Manager: Sari Octomo, Manager: Herry Wardiyanto, Event Officer: Budiman Mulyadi, Rizky Aldi, Promotion: Reancy Triashari,  
 Circulation: Stevanus Budi, Finance: Anna Gertruda, Alamat Iklan: Berita Satu Plaza, lantai 9, Jl Jend Gatot Subroto Kav 35-36 Jakarta-12950,  
 Rekening: Bank Mandiri Cabang Jakarta Kota, Rek Giro: A/C 115.008600.2559, BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.755 (Iklan), BCA Cabang Plaza Sentral Rek. Giro No. 441.30.40.747 (Sirkulasi),  
 Harga Langganan: Rp 75.000/ bulan, Terbit 6 kali seminggu. Luar Kota Per Pos minimum langganan 3 bulan bayar di muka ditambah ongkos kirim,  
 Alamat Sirkulasi: Hotel Aryaduta Semanggi, Tower A First Floor, Jl Garnisun Dalam No. 8 Karet Semanggi, Jakarta 12930, Telp: 29957555 - 29957500 ext 3206 Percetakan: PT Gramedia

http://www.suarapembaruan.com e-mail: koransp@suarapembaruan.com

Wartawan Suara Pembaruan dilengkapi dengan identitas diri.  
 Wartawan Suara Pembaruan tidak diperkenankan menerima pemberian dalam bentuk apa pun dalam hubungan pemberitaan.